



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**  
**LAPORAN SINGKAT**  
**RDP PANJA PENGANGKATAN GTK HONORER MENJADI ASN (PGTKH-ASN)**  
**KOMISI X DPR RI**  
**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2020 – 2021.
Masa Sidang ke-	: <b>IV (Empat).</b>
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Dengan	: 1. Kemendikbud RI 2. Kemendagri RI 3. Kemenpan-RB RI 4. BKN RI
Hari/Tanggal	: <b>Senin, 29 Maret 2021.</b>
Pukul	: <b>14.00 – Selesai.</b>
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (Fisik dan Virtual Menggunakan Zoom).
Pimpinan Rapat	: <b>Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., MM.</b> (Wakil Ketua Komisi X DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Agenda acara	: Konsep/skema pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorar menjadi ASN Aspek Pengelolaan.
Hadir Komisi X DPR RI	: 19 orang dari 30 orang anggota Panja Pengangkatan GTK Honorar Menjadi ASN Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: 1. <b>Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd</b> (Sekretaris Diirjen GTK Kemendikbud RI) 2. <b>Andhika Ganendra</b> (Ditjen GTK Kemendikbud RI) 3. <b>Sri Purwaningsih, SH., MAP</b> (Plh. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI) 4. <b>Dr. Akbar Ali, M.Si</b> (Direktur Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPKD) Kemendagri RI) 5. <b>Dr. Ir. Katmoko Ari Sambodo</b> (Plt. Asdep Perencanaan dan Pengadaan Kemenpan-RB RI) 6. <b>Suharmen, S.Kom., M.Si</b> (Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN RI) 7. <b>Anna Hasnah Hasaruddin</b> (Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN BKN RI)

## I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Panja Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN Komisi X DPR-RI dibuka pada pukul 14.10 WIB oleh Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., MM. (Wakil Ketua Komisi X DPR RI), setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR-RI tentang Tata-Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan narasumber, serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN Komisi X DPR RI.

## II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

A. Panja Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada **Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd** (Sekretaris Dirjen GTK Kemendikbud RI), **Sri Purwaningsih, SH., MAP** (Plh. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI), **Dr. Akbar Ali, M.Si** (Direktur Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kemendagri RI), **Dr. Ir. Katmoko Ari Sambodo** (Plt. Asdep Perencanaan dan Pengadaan Kemenpan-RB RI), **Suharmen, S.Kom., M.Si** (Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN RI) yang telah menyampaikan paparan, penjelasan, dan masukan mengenai pengelolaan dalam program Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN (*bahan terlampir*), dengan poin-poin utama, antara lain:

### 1. Kemendikbud RI

- a. Kemendikbud RI menyampaikan bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri adalah 2,2 juta, saat ini terisi oleh PNS 1,1 juta, Honorer 742.000, CPNS 2019 dan PPPK 2020 sebanyak 84.000. Apabila seluruh guru honorer di sekolah negeri diangkat menjadi ASN guru PPPK, masih terdapat kekurangan guru sebanyak 275.000
- b. Total usulan formasi Pemerintah Daerah setelah dilakukan penyesuaian dengan dapodik adalah sebesar 523.120 dengan beberapa catatan: antara lain terdapat sebanyak 27 daerah tidak mengajukan formasi (8 diantaranya Papua dan Papua Barat), dan terdapat 19 daerah di luar Papua dan Papua Barat belum mengusulkan formasi guru PPPK, serta terdapat sebanyak 165 daerah mengusulkan formasi kurang dari 50% kuota, walaupun sudah ditegaskan bahwa pembayaran gaji guru PPPK tahun 2021 telah diperhitungkan dalam DAU.
- c. Terdapat kebijakan Afirmasi yang diberikan kepada peserta dengan usia 40 tahun ke atas yang aktif selama tiga tahun terakhir sebanyak 75 poin nilai kompetensi teknis dari nilai maksimal 500 poin. Afirmasi juga diberikan kepada peserta penyandang disabilitas sebanyak 50 poin nilai kompetensi teknis dari 500 poin.
- d. Peserta yang memiliki sertifikasi guru mendapatkan nilai penuh pada tes kompetensi teknis, namun mereka tetap perlu lulus *passing grade* untuk tes manajerial, sosiokultural dan wawancara. Mengenai usulan Panja

PGTKH-ASN tentang afirmasi bonus poin akan disampaikan dalam rapat dengan K/L terkait.

- e. Kemendikbud menyediakan materi pembelajaran online untuk membantu kesiapan mengikuti ujian seleksi guru ASN PPPK. Modul belajar berisi substansi materi esensial, bersifat rangkuman, dengan AudioVideo/Perangkat lainnya, serta ruang kolaborasi dan komunitas pembelajaran. Untuk daerah dengan kategori sulit jaringan internet, diberikan modul dalam bentuk soft/hard copy.
- f. Kemendikbud RI akan mengusulkan jabatan fungsional baru bagi tenaga kependidikan di sekolah agar dapat masuk dalam formasi PPPK.

## **2. Kemendagri RI**

- a. Kemendagri RI telah menerbitkan Permendagri No.6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan PPPK yang bekerja pada Instansi Daerah.
- b. Penjelasan tentang pembayaran belanja pegawai PPPK tercantum dalam Pasal 2 Permendagri No.6 Tahun 2021 dimana pembayaran belanja pegawai PPPK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- c. Permendagri No.6 Tahun 2021 Pasal 3 mengatur mengenai gaji dan tunjangan PPPK.
- d. Kemendagri RI akan melakukan evaluasi Perda APBD tahun 2021 khususnya terkait pembayaran gaji dan tunjangan guru PPPK yang akan diangkat pada tahun 2021.

## **3. Badan Kepegawaian Negara RI**

- a. Parameter rekrutmen ASN tercantum dalam RPJMN 4 (2020-2024) yaitu memiliki integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT & Bahasa asing, *hospitality*, *networking*, dan *entrepreneurship*.
- b. Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN) terintegrasi dengan NIK bekerja sama dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai awal data pendaftaran SSCASN, Dapodik Kemendikbud RI, serta Integrasi data Akreditasi Program Studi maupun Akreditasi Universitas dan Lembaga Pendidikan Tinggi sebagai validasi pendidikan pelamar.
- c. Sumber data untuk pengangkatan guru honorer menjadi guru PPPK adalah Dapodik Kemendikbud RI secara terintegrasi dan eks-THK II di database BKN. Peserta seleksi hanya dapat memilih 1 (satu) dari tiga jenis seleksi Calon ASN, yaitu CPNS, PPPK Guru atau PPPK (Non Guru)
- d. Mengenai jabatan Guru PPPK diberikan fleksibilitas dan masa kontrak akan diberikan perpanjangan secara otomatis sampai dengan batas usia yang dipersyaratkan dalam jabatan.

#### 4. Kemenpan-RB RI

- a. Penetapan formasi guru PPPK tahun 2021 sejumlah 565.633
  - b. Kebutuhan ASN (PNS/PPPK) secara nasional ditetapkan oleh menteri PANRB setiap tahun, memperhatikan pendapat menteri keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN.
  - c. Afirmasi untuk masa pengabdian akan dipertimbangkan namun sistem merit harus tetap berjalan, maka besaran afirmasinya mempertimbangkan rasa keadilan.
- B. Terhadap paparan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan sikap, antara lain:
1. mendesak Kemendikbud RI, Kemendagri RI dan Kemenkeu RI agar menerbitkan peraturan/surat edaran mengenai kepastian pembayaran gaji dan tunjangan guru PPPK yang anggarannya telah diperhitungkan melalui DAU. Hal ini untuk mendorong dan memberi kesempatan kepada pemerintah daerah yang belum mengusulkan/memenuhi formasi seleksi guru PPPK tahun 2021 agar segera mengirimkan datanya.
  2. mendesak pemerintah untuk memberikan afirmasi nilai kompetensi tambahan kepada:
    - a. guru honorer yang telah berusia diatas 35 tahun
    - b. guru honorer dengan perhitungan beban kerja 3 tahun berturut-turut
    - c. guru honorer yang mengabdikan di daerah 3T
  3. mendesak pemerintah untuk memperpanjang waktu pengajuan formasi dan pendaftaran seleksi guru PPPK tahun 2021.
  4. mendesak Kemendikbud RI untuk membuat jabatan fungsional baru bagi tenaga kependidikan sekolah dalam formasi PPPK.
  5. mendesak pemerintah untuk membuat regulasi yang adil sehingga guru di sekolah swasta mendapat perlakuan yang sama dengan guru di sekolah negeri.
  6. mendorong pemerintah meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program seleksi guru PPPK.
- C. Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI meminta kepada narasumber untuk mengirimkan secara tertulis atas tanggapan dan pertanyaan Anggota Panja PGTKH-ASN yang belum terjawab, paling lambat 5 April 2021.
- D. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDP ini (*harap paparan dikirimkan kepada Tim Panja*), dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.

III. **PENUTUP**  
Rapat ditutup pada pukul 18.30 WIB

**KETUA RAPAT,**

  
**Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., MM.**